



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR BARAT**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2022 dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2022 dibuat untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan maupun acuan untuk menyusun kegiatan agar pelayanan publik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik khususnya di Kecamatan Denpasar Barat.

Sangat disadari bahwa Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan yang kami miliki, maka kami mohon kritik dan sarannya demi kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2022.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2022 ini kami buat. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2022 ini, dan semoga berguna bagi semua masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

Denpasar Barat, 8 Agustus 2022

KECAMATAN DENPASAR BARAT



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP..M.Si
Pembina

NIP. 19790411 199802 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.1.1 Umum | 1 |
| 1.1.2 Struktur Organisasi Kantor Camat Denpasar Barat | 2 |
| 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2021 | 6 |
| 2.1 Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 | |
| PD | 6 |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD | 11 |
| 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022..... | 11 |
| BAB IV PENUTUP | 16 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan bahwa Kecamatan di bentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan Kota Denpasar baik dalam meningkatnya jumlah penduduk maupun laju pertumbuhan perekonomian masyarakat diberbagai bidang seperti pembangunann, transportasi, pelayanan kepada masyarakat maka memerlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Denpasar Barat tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Denpasar yaitu **"KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU"**

Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan Renja PD berdasarkan Misi Kota Denpasar yaitu:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan bali.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, maka Walikota Denpasar melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat Denpasar Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tugas pokok Camat Denpasar Barat adalah sebagai berikut sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah:

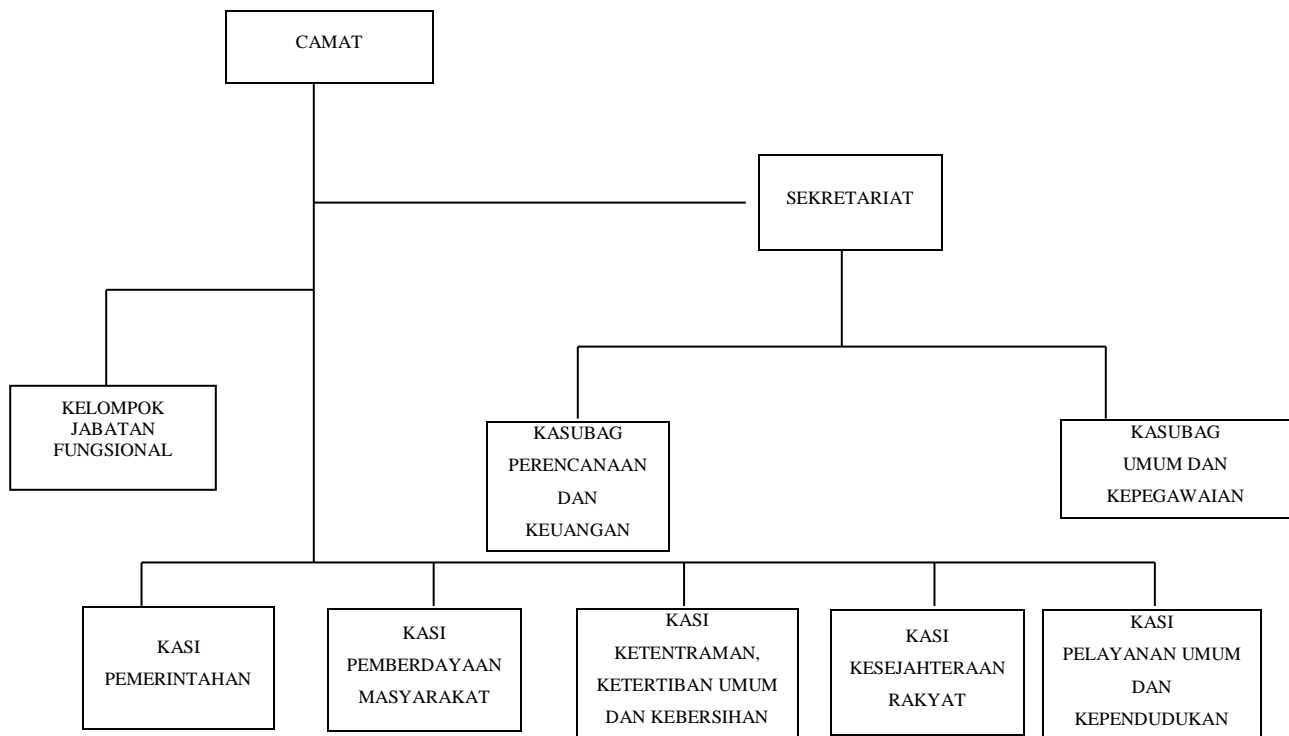
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

1.1.2 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT DENPASAR BARAT

Dalam merealisasikan program kebijakan pemerintahan, Kantor Camat Denpasar Barat mempunyai 1 Camat, 1 Sekretaris Camat, 2 Kasubag dan 5 Kepala Seksi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Denpasar Barat.

Adapun struktur organisasi Kantor Camat Denpasar Barat adalah sebagai berikut:

➤ **Struktur Organisasi Kantor Camat Denpasar Barat:**



Nama Pejabat Struktural Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar :

- Camat : Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP., M.Si
- Sekretaris Kecamatan : I Putu Eka Pertama, S.Sos., M.A.P
- Kasubag Keuangan dan Perencanaan : Ida Ayu Made Margarini, S.Sos., M.A.P
- Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian : I Made Sudarsana, S.Sos
- Kasi Pemerintahan : I Kadek Partha Wiguna, S.Sos
- Kasi Pelayanan Umum dan Kependudukan : Ni Made Rai Ani, SE
- Kasi Kesejahteraan Masyarakat : Ida Bagus Gede Wisnu Wardana, SE
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban : I Gusti Ketut Aryawirawan, SH
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat : Drs. Ida Bagus Mayun Gunawan

Jumlah Pegawai keseluruhan di Kantor Camat Denpasar Barat adalah 50 orang :

- PNS : 24 orang
- Kontrak : 26 orang

➤ **Anggaran :**

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sumber dananya berasal dari APBD Kota Denpasar.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang *Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, 3465).
2. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016.
7. PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
8. PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dimaksud untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik, bersih, bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Good Governance).

Adapun tujuan dari Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja PD Kecamatan Denpasar Barat tahun 2022, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- Latar Belakang.
- Umum.
- Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Denpasar.
- Landasan Hukum.
- Maksud dan Tujuan.
- Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Tiwulan I Tahun 2022.

Bab III RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kantor Camat Denpasar Barat

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisa efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Kota Denpasar

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Indikator Kegiatan (Output) | Target Tahun 2022 | | Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2022 | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 14.185.609.321 | 39 | 3.326.509.729 |
| | <i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>100</i> | <i>8.551.430.431</i> | <i>39</i> | <i>3.326.509.729</i> |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 100 | 8.551.430.431 | 39 | 3.326.509.729 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----|---------------|
| | <i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | <i>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 100 | 555.259.424 | 45 | 250.306.750 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100 | 10.836.682 | 69 | 7.442.700 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 | 357.016.400 | 47 | 166.310.900 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga | 100 | 39.551.092 | 63 | 25.064.900 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 100 | 78.234.000 | 25 | 19.370.000 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan | 100 | 40.221.250 | 47 | 18.943.250 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Surat Kabar/Majalah | 100 | 29.400.000 | 45 | 13.175.000 |
| | <i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | <i>Tersedianya Barang Milik Daerah</i> | 100 | 272.396.634 | 52 | 142.945.899 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 | 112.500.000 | - | 53.295.899 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai | 100 | 159.896.634 | - | 89.650.000 |
| | <i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100 | 4.109.577.832 | 44 | 1.821.442.517 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----|-------------|
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100 | 230.730.000 | 31 | 71.237.281 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 | 2.068.633.192 | 42 | 875.946.136 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 | 1.810.214.640 | 48 | 874.259.100 |
| | <i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100 | 696.945.000 | 35 | 244.502.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaaran Jabatan | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100 | 33.170.000 | 37 | 12.390.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100 | 366.350.000 | 46 | 167.127.000 |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 | 25.000.000 | - | - |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 100 | 135.850.000 | 36 | 49.435.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 100 | 136.575.000 | 11 | 15.550.000 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|--------------------|
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai Survey Kepuasan (SKM) Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat | 100 | 152.645.000 | 4 | 5.450.000 |
| | <i>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | <i>Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan</i> | <i>100</i> | <i>73.495.000</i> | <i>7</i> | <i>5.450.000</i> |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Dokumen yang dihasilkan | 100 | 26.400.000 | 16 | 4.125.000 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu | 100 | 47.095.000 | 3 | 1.325.000 |
| | <i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat</i> | <i>Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat</i> | <i>100</i> | <i>79.150.000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Survey Kepuasan Masyarakat | 100 | 79.150.000 | - | 4.150.000 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 100 | 1.965.106.613 | 59 | 582.910.000 |
| | <i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i> | <i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan</i> | <i>100</i> | <i>1.965.106.613</i> | <i>59</i> | <i>582.910.000</i> |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan | 100 | 1.117.336.471 | 31 | 347.965.000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100 | 847.770.142 | 28 | 234.945.000 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | 354.357.200 | 23 | 82.770.400 |
| | <i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i> | <i>Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i> | <i>100</i> | <i>354.357.200</i> | <i>-</i> | <i>82.770.400</i> |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan | 100 | 354.357.200 | - | 82.770.400 |
| 6 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Kewenangan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan | 100 | 37.685.000 | - | - |
| | <i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar | 100 | 37.685.000 | - | - |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar | 100 | 37.685.000 | - | - |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan | 100 | 18.425.000 | - | - |
| | <i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa | 100 | 18.425.000 | - | - |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya Evaluasi RAPBDes | 100 | 18.425.000 | - | 1.125.000 |
| | | | 100 | 16.713.828.134 | 39 | 6.462.112.295 |

BAB III

RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2022 Kantor Camat Denpasar Barat

Perubahan Rencana Kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar yang akan dilaksanakan. Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Denpasar Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rencana Usulan Perubahan Kecamatan Denpasar Barat

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Indikator Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja | Pagu APBD Induk 2022 | Pagu Usulan Perubahan | Bertambah/ Berkurang |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 14.185.609.321 | 13.585.065.470 | -600.543.851 |
| | <i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 100 | 8.551.430.431 | 7.650.616.500 | -900.813.931 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 100 | 8.551.430.431 | 7.650.616.500 | -900.813.931 |
| | <i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | <i>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 100 | 555.259.424 | 550.439.424 | -4.820.000 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor | 100 | 10.836.682 | 10.836.682 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 | 357.016.400 | 352.296.400 | -4.720.000 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga | 100 | 39.551.092 | 39.551.092 | 0 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 100 | 78.234.000 | 78.134.000 | -100.000 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan | 100 | 40.221.250 | 40.221.250 | 0 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Surat Kabar/Majalah | 100 | 29.400.000 | 29.400.000 | 0 |
| | <i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | <i>Tersedianya Barang Milik Daerah</i> | 100 | <i>272.396.634</i> | <i>302.614.834</i> | <i>30.218.200</i> |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 | 112.500.000 | 135.218.200 | 22.718.200 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap Pakai | 100 | 159.896.634 | 167.396.634 | 7.500.000 |
| | <i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | <i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100 | <i>4.109.577.832</i> | <i>4.345.881.472</i> | <i>236.303.640</i> |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100 | 230.730.000 | 229.530.000 | -1.200.000 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 | 2.068.633.192 | 2.068.633.192 | 0 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 | 1.810.214.640 | 2.047.718.280 | 237.503.640 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | <i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 100 | 696.945.000 | 735.513.240 | 38.568.240 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaaran Jabatan | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100 | 33.170.000 | 35.342.000 | 2.172.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100 | 366.350.000 | 365.450.000 | -900.000 |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 100 | 135.850.000 | 173.146.240 | 37.296.240 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik | 100 | 136.575.000 | 136.575.000 | 0 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai Survey Kepuasan (SKM) Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat | 100 | 152.645.000 | 267.121.000 | 114.476.000 |
| | <i>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | <i>Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan</i> | 100 | 73.495.000 | 187.971.000 | 114.476.000 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Dokumen yang dihasilkan | 100 | 26.400.000 | 82.616.000 | 56.216.000 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan Lomba PSN, PKK dan posyandu | 100 | 47.095.000 | 105.355.000 | 58.260.000 |
| | <i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat</i> | <i>Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat</i> | 100 | <i>79.150.000</i> | <i>79.150.000</i> | <i>0</i> |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Survey Kepuasan Masyarakat | 100 | 79.150.000 | 79.150.000 | 0 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah | 100 | 1.965.106.613 | 3.560.270.613 | 1.595.164.000 |
| | <i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i> | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan | 100 | <i>1.965.106.613</i> | <i>3.560.270.613</i> | <i>1.595.164.000</i> |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana di Kelurahan | 100 | 1.117.336.471 | 1.259.836.471 | 142.500.000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 100 | 847.770.142 | 2.300.434.142 | 1.452.664.000 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | 354.357.200 | 343.913.200 | -10.444.000 |
| | <i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i> | <i>Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i> | 100 | <i>354.357.200</i> | <i>343.913.200</i> | <i>-10.444.000</i> |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Pendataan Penduduk yang dilaksanakan, Jumlah Patroli Lingkungan yang dilaksanakan | 100 | 354.357.200 | 343.913.200 | -10.444.000 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Kewenangan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan | 100 | 37.685.000 | 37.685.000 | 0 |
| | <i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar | 100 | 37.685.000 | 37.685.000 | 0 |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Kegiatan HUT RI dan HUT Kota Denpasar | 100 | 37.685.000 | 37.685.000 | 0 |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan | 100 | 18.425.000 | 24.175.000 | 5.750.000 |
| | <i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | <i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa</i> | 100 | 18.425.000 | 24.175.000 | 5.750.000 |
| | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya Evaluasi RAPBDes | 100 | 18.425.000 | 24.175.000 | 5.750.000 |
| | J U M L A H | | 100 | 16.713.828.134 | 17.818.230.283 | 1.104.402.149 |

BAB V

PENUTUP

Proses demokratisasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan, sedang peran pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan tersebut mengubah peran masyarakat dalam proses pembangunan dan yang bersifat partisipasi masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian, Kecamatan Denpasar Barat sebagai ujung tombak pemerintahan di Daerah merupakan posisi yang sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dibidang pembangunan secara berkelanjutan.

Rencana Program di Kecamatan Denpasar Barat ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Barat pada periode tahun 2022. Rencana program ini hanya merupakan program pemberdayaan masyarakat, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Denpasar. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, dan berhasil guna serta sesuai dengan Visi dan Misi Kota Denpasar yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah, untuk itu Kantor Camat Denpasar Barat perlu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat dan mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, instansi pemerintah dan bukan pemerintah yang berperan utama dalam proses pemberdayaan masyarakat ini, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Kantor Camat Denpasar Barat dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, di instansi terkait dalam proses pemberdayaan masyarakat, serta keberanian untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat agar lebih meningkat, berimbang, demokratis dan adil.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Denpasar Barat tahun 2022 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Denpasar Barat.

Denpasar Barat, 8 Agustus 2022



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP.,M.Si

Pembina

NIP. 19790411 199802 1 001